



# LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2023

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PREFESIONALISME

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena berkat izin-Nya Laporan Kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang telah di-*input* dan divalidasi oleh Direktorat PSMK.

Laporan ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPK melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun secara berjenjang dimulai dari satker terkecil dalam organisasi BPK sehingga menjadi satu laporan utuh yang mencerminkan kinerja BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu satker di BPK, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam laporan ini. Kuantifikasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Auditor Utama KN V BPK RI di Jakarta pada Desember 2022.

Terdapat 13 IKU yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Ke-13 IKU tersebut merupakan penjabaran dari satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Dari 13 IKU tersebut, empat IKU mencapai target, bahkan empat IKU melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan lima IKU lainnya tidak mencapai target. Penjelasan lengkap atas pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan termuat dalam laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Selain itu harapan kami Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

**Palembang, 30 Januari 2024**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Kepala Perwakilan**



**Andri Yogama**

**NIP 197106061997031005**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .....	5
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .....	7
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .....	10
E. Isu Strategis.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN</b> .....	15
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .....	15
B. Target Kinerja.....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN</b> .....	23
A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).....	23
B. Capaian Kinerja.....	23
C. Analisis Efisiensi.....	35
D. Perubahan Budaya Kerja.....	36
E. Realisasi Anggaran.....	37
F. Inovasi.....	38
G. Penghargaan.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	42
 <b>LAMPIRAN</b>	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023	
3. Anggaran dan Realisasi Anggaran Perwakilan Tahun 2023	
4. Skor Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	
5. Berita Acara Validasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2023	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
Tabel 3.2	Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2023 dengan Skor Tahun 2019 s.d. 2023 (5 tahun terakhir)
Tabel 3.3	Grafik Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2023
Tabel 3.4	IKU dan Target Pencapaiannya Tahun 2020-2024
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun
Tabel 3.6	Anggaran, <i>Output</i> , dan Indikator Kinerja Tahun 2023

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.1 Fungsi yang Diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 1.3 Peta Wilayah Kerja Subauditorat Sumatera Selatan I dan II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
- Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
- Gambar 2.1 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024
- Gambar 2.2 Visualisasi Renstra AKN V 2020-2024
- Gambar 2.3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024
- Gambar 2.4 Nilai-nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan
- Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2019 s.d. 2023 (5 tahun terakhir)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK suatu lembaga tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13, yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK dan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V).

### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V). BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

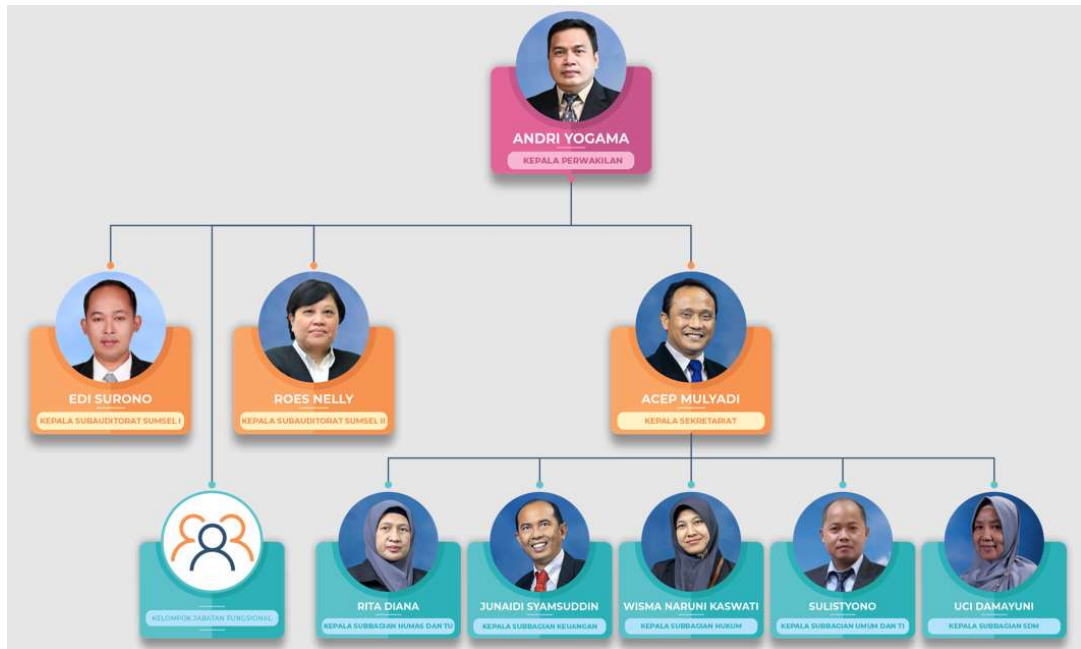
Berdasarkan Pasal 471 Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, menyelenggarakan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 472 Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini.

**Gambar 1.1** Fungsi yang Diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan



### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan



**Gambar 1.2.** Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan melalui Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala dengan uraian tugas, sebagai berikut.

#### 1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi lima subbagian dengan uraian tugas, sebagai berikut.

##### a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

##### b) Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.



**c) Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

**d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)**

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

**e) Subbagian Hukum**

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum, meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

**2. Subauditorat Sumatera Selatan I**

Subauditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas, sebagai berikut.

a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan

b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

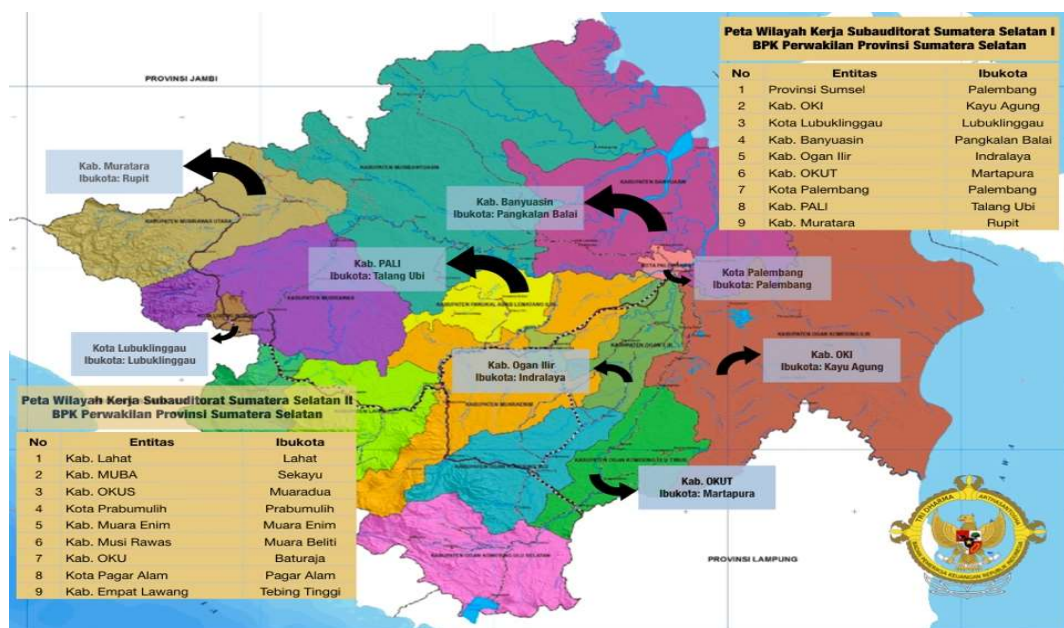
**3. Subauditorat Sumatera Selatan II**

Subauditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas:

a) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten

Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
  - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
  - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
  - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan
- b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.



**Gambar 1.3** Peta Wilayah Kerja Subauditorat Sumatera Selatan I dan II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

**D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

**1. Sumber Daya Manusia**

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh 246 orang pegawai, meliputi sembilan pejabat struktural (satu eselon II, tiga eselon III dan lima eselon IV), 161 orang pada jabatan fungsional pemeriksa, 42 orang pada jabatan tertentu, dua orang PPPK dan 32 orang tenaga tidak tetap (TTT).



Berdasarkan jenis kelamin (diluar TTT), pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memiliki pegawai Laki-laki sebanyak 99 orang atau 46,26% dari keseluruhan pegawai dan pegawai perempuan sebanyak 115 orang atau 53,74% dari keseluruhan pegawai

**Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan pangkat/golongan (diluar PPPK dan TTT), jumlah pegawai dengan golongan II sebanyak 7 orang atau 3,30% dari keseluruhan pegawai, golongan III sebanyak 186 orang atau 87,74%, dan golongan IV sebanyak 19 orang atau 8,96% dari keseluruhan pegawai



**Gambar 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**



Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan (diluar TTT), jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/SMK sebanyak tiga orang atau 1,40% dari keseluruhan pegawai, pendidikan D3 sebanyak enam orang atau 2,81%, pendidikan S1/D4 sebanyak 157 orang atau 73,36%, dan pendidikan S2 sebanyak 48 orang atau 22,43% dari keseluruhan pegawai

**Gambar 1.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

## 2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran semula BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp33.022.970.000,00 dan setelah direvisi (Revisi DIPA ke-18 tanggal 08 Desember 2023) menjadi sebesar Rp38.867.619.000,00, dengan realisasi sebesar Rp38.674.920.548,00 atau 99,50%, terdiri dari:

- a. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp66.333.600,00;
- b. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp19.398.203.210,00;
- c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp783.439.207,00;
- d. Pemeriksaan Keuangan Negara sebesar Rp18.426.944.531,00.

## E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus menjadi perhatian dan dasar penetapan strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024, meliputi:

### 1. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK perlu ditingkatkan yang merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Peningkatan penyelesaian tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi salah satu agenda perubahan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mendorong entitas pemeriksaan untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan juga meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Tahun 2023, pencapaian penyelesaian tindak lanjut cukup signifikan dengan realisasi sebesar 86,34% dari target sebesar 75%. Hal ini karena adanya komitmen yang tinggi dari Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemda selain dari kegiatan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan secara rutin setiap semester.

### 2. Integrasi Sistem Informasi BPK dan *update database*

Sistem informasi berbasis teknologi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menjalin kerjasama dengan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan dalam penyediaan *database* pemeriksaan. Namun *database* tersebut juga belum terintegrasi dengan baik dan belum di-*update* secara memadai.

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat

administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Terlebih lagi untuk kedepannya sangat diperlukan dukungan integrasi dalam sistem informasi.

### 3. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan harus juga didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier serta pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) dibidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK, selain juga melaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa dan non pemeriksa salah satunya dengan adanya **CorpU BPK**, yaitu sebagai inovasi untuk peningkatan kapasitas pemeriksaan keuangan negara. **CorpU** BPK dapat dipahami sebagai sistem pembelajaran yang memiliki learning focus dimana kurikulum, silabus, dan bahan ajar disusun berdasarkan masalah kinerja yang dihadapi oleh individu dan organisasi dalam mendukung tujuan organisasi. Pengembangan konten materi pembelajaran dibuat yang menarik, fleksibel, dan mudah diakses, sehingga bisa memfasilitasi konsep learning from anywhere and anytime.

### 4. Peningkatan Pemahaman dan Implementasi Nilai Dasar BPK

Pada Tahun 2021 s.d. 2023, terdapat target terkait pemahaman pegawai dan implementasi Nilai Dasar BPK yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan belum mencapai target 5,00 selama tiga tahun terakhir. Akan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan target ini antara lain dengan melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pegawai terkait pemahaman dan implementasi nilai dasar BPK, sehingga diharapkan pada akhir masa Renstra, target ini akan tercapai.

### 5. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

LHP merupakan manifestasi performa BPK sebagai Lembaga Negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepercayaan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan reviu berjenjang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan dan membentuk tim perencanaan dan pengkajian pemeriksaan setiap tahunnya yang bertugas menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Namun berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Direktorat EPP) atas tingkat konsistensi dan akurasi LHP pada IKU 1 “Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan”, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan belum dapat mencapai target. Akan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan target ini, antara lain dalam proses penyusunan LHP juga dilaksanakan reviu silang atau pengecekan kembali LHP sebelum dinyatakan net dan

diserahkan kepada entitas baik oleh para Ketua Tim maupun Tim Reviu. Selain itu, memaksimalkan Tim Reviu LHP yang bertugas mereviu temuan KHP dari sisi penulisan dan substansi dan membentuk Tim Teknis *Audit* bertugas memberikan pendapat dan masukan atas TP, sehingga diharapkan pada akhir masa Renstra, target ini akan tercapai.

6. Hubungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemangku Kepentingan perlu Dikelola dengan Baik.

Pemeriksaan BPK belum berdampak secara signifikan bagi pemangku kepentingan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas permintaan entitas dan sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada entitas relatif sangat sedikit. Dengan adanya isu ini, diperlukan pengelolaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh entitas, sehingga dapat diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan (*audit on call*).

Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah/nasional. Pemeriksaan ini dituangkan dalam pemeriksaan tematik lokal dan nasional. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Semester II Tahun 2023 telah terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal (infrastruktur jalan) pada lima entitas, tematik nasional PN2 (*mandatory spending* dan aset desa) pada dua entitas, dan tematik nasional PN5 (pelayanan publik) sebanyak satu entitas.

Selain isu-isu diatas, seiring dengan kebijakan Badan dan kondisi serta permasalahan global yang terjadi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ikut serta dalam pelaksanaan pemeriksaan tematik baik nasional maupun lokal, dengan isu pemeriksaan yang diangkat dan telah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2023, yaitu terkait:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (tematik nasional)
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan *Mandatory Spending* dan Penerimaan Daerah dalam Rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan pada Pemerintah Kota Prabumulih (tematik nasional)
3. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Program Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palembang (tematik nasional)
4. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Kota Lubuklinggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten OKU (tematik lokal)
5. Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2021, 2022, dan 2023 (s.d. Semester I)

6. Pemeriksaan atas Operasional BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022 dan 2023
7. Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**

Renstra BPK 2020-2024 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sesuai dengan Peraturan BPK RI No. 3 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Pengelolaan Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu **peta strategi** yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasi proses-proses internal atau *internal process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

Dalam rangka memastikan Renstra dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi BPK dan para pemangku kepentingan, maka dokumen Renstra ini dilengkapi dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR) sebagaimana tertuang dalam Keputusan BPK No.5/K/I-XIII.2/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021. Dalam dokumen ini akan diuraikan lebih rinci terkait kegiatan, anggaran, satker pelaksana, target kinerja, dan lain-lain.



Gambar 2.1 Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

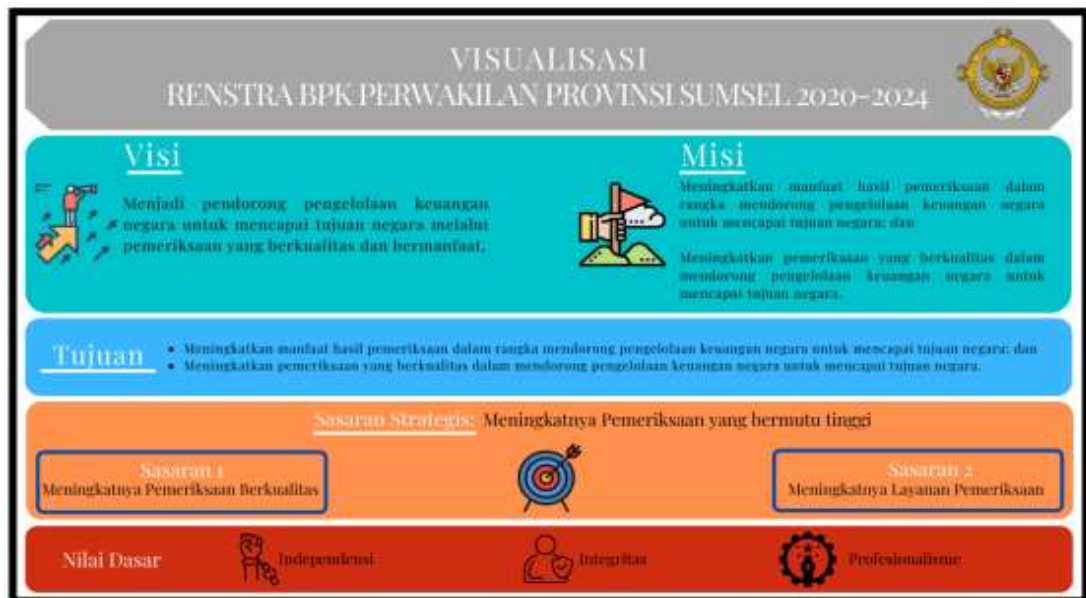


Tortama KN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan sasaran strategis yang digambarkan dalam bentuk Visualisasi Renstra AKN V 2020-2024, sebagai berikut.



Gambar 2.2 Visualisasi Renstra AKN V 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis pada BPK *Wide*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kinerja BPK, dalam hal ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024, berikut.



Gambar 2.3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024

Dari peta strategis di atas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis, sebagai berikut:

**1. Visi**

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

**2. Misi**

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara, dan;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan negara.

**3. Nilai Dasar**

Dalam melaksanakan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menjaga nilai-nilai dasar, sebagai berikut:



**Gambar 2.4** Nilai- Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan

a. Independensi

BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. Profesionalisme

BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

**4. Tujuan Strategis**

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

## 5. Sasaran Strategis

### a. Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi

Aktivitas pada strategi ini antara lain:

- 1) Secara aktif berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan, dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal yang mendukung pencapaian IKU 1-Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 4-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5-Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan dan IKU 6-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal serta Indikator Kinerja Keluaran (IKK) 1-Ketepatan Waktu Penyampaian LHP. Aktivitas ini dilakukan untuk menjawab isu terkait masih ditemukannya kesalahan-kesalahan dalam penyusunan LHP;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik pada 18 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 2-Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik;
- 3) Melakukan pemeriksaan atas LKPD dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu alternatif penyelesaian atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 3-Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK;
- 4) Menyusun dan mengumpulkan Bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 4-Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat;
- 5) Menyusun resume hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah dalam tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 5-Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP;
- 6) Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 6-Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas;
- 7) Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan secara sistematis dengan pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SiPTL, sehingga laporan pemantauan tindak lanjut selalu *update*. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 7-Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- 8) Melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 8-Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah;
- 9) Melakukan pemeriksaan awal/pendahuluan sebagai langkah penentuan area kunci dan fokus permasalahan sebagai bahan untuk pendalaman dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 9-Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan.

**b. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan**

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan aktivitas-aktivitas, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya hak gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji pegawai, pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melalui kegiatan layanan perkantoran. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 12-Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- 2) Melakukan layanan penyiapan sarana internal, berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan pengolah data dan komunikasi yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 11-Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan;
- 3) Melakukan layanan penyiapan prasarana internal, berupa perbaikan dan renovasi gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 11-Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan;
- 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan untuk menunjang terlaksananya tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut pemeriksaan, memastikan pemanfaatan pengelolaan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD) serta menjamin terlaksananya revidu atas hasil pemeriksaan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 10-Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan;
- 5) Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, berupa kegiatan pelayanan TU, pelaksanaan layanan kehumasan, pelaksanaan layanan pengelolaan SDM, pelaksanaan layanan administrasi keuangan, pelaksanaan layanan hukum, hingga pelaksanaan pelayanan kegiatan umum dan pemanfaatan TI. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK 11-Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan.

## B. Target Kinerja

### 1. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Sedangkan untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaiannya. IKU beserta target pencapaiannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN V) pada Desember 2022.

Berikut sasaran kegiatan, anggaran, indikator, dan target kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023:

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp33.022.970.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp13.514.999.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp19.507.971.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

**Tabel 1.** Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

Rencana aksi pencapaian target kinerja Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 13 indikator utama yang secara garis besar dapat digambarkan dengan aktivitas utama, sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai target IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, diwujudkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan mengacu pada peraturan dan panduan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang berkualitas, termasuk pemenuhan QA dan QC pemeriksaan dengan target waktu pencapaian s.d. Desember sebesar **100%**;
- b. Untuk mencapai target IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan DTT sesuai harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2), mengikuti Rakor Penyusunan Rencana Pemeriksaan dan melakukan evaluasi kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan, dengan waktu pencapaian s.d. akhir tahun sebesar **100%**;
- c. Untuk mencapai target IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut setiap semesternya termasuk validasi dan verifikasi dokumen tindak lanjut, dan evaluasi atas rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, dengan target setiap triwulan sebesar **75%**;
- d. Untuk mencapai target IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal, dengan merealisasikan rencana yang tertuang dalam RKP, dan memastikan alokasi anggaran, personil, dan *workshop* pemeriksaan dengan target pada akhir tahun sebesar **100%**;
- e. Untuk mencapai target IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari pemangku kepentingan sesuai arahan pimpinan BPK RI, dengan target sebesar **100%** dilaksanakan dengan menyusun strategi pengelolaan rencana pemeriksaan termasuk alokasi anggaran dan personilnya;
- f. Untuk mencapai target IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, dengan target nilai sebesar **5,00 (Sangat Memuaskan)** dilaksanakan antara lain melalui sosialisasi terkait visi, misi, dan nilai dasar BPK, pembuatan pakta integritas, serta pengarahan Kepala Perwakilan untuk menambah pengetahuan para pegawai pada saat mengisi survei PMPRB yang dilakukan oleh surveyor independen;
- g. Untuk mencapai target IKU Hasil Evaluasi AKIP, dengan target nilai **A (89,00)**, dilaksanakan antara lain dengan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja, pengelolaan kinerja, serta menyiapkan data dan dokumen dalam rangka penilaian AKIP oleh Itama dan melaksanakan evaluasi mandiri atas AKIP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi Prisma-SAKIP;

- h. Untuk mencapai target IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, dengan target akhir tahun sebesar **98%**, dilaksanakan dengan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi/aplikasi internal BPK oleh para pemeriksa dan pelaksana untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan (SiAP, SMP, SIPTL, Jasmin, dan SISDM);
- i. Untuk mencapai target IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dengan komponen berupa penyusunan *best practice*/replika *best practice*, dan melaksanakan empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan per triwulan seperti diklat, KTF, dll dalam satu tahun, dengan target s.d. akhir tahun sebesar **100%**;
- j. Untuk mencapai target IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi, dengan target nilai **3,80 (Memuaskan)**, dilaksanakan melalui upaya peningkatan komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, antara lain melalui kegiatan komunikasi *audit*; serta dilakukan survey terhadap *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan oleh surveyor independen;
- k. Untuk mencapai target IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, yang ditargetkan setiap bulannya sampai dengan akhir tahun sebesar **100%**, yaitu dengan melaksanakan diklat/pelatihan bagi seluruh pemeriksa minimal 40 JP dan non pemeriksa minimal 20 JP untuk pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi dalam setahun; dan
- l. Untuk mencapai target IKU Tingkat Kinerja Anggaran, dengan target setiap triwulan sebesar **88,50%**, dilaksanakan antara lain dengan kegiatan mengikuti rakor kebijakan dan evaluasi pengelolaan anggaran, penyusunan data capaian *output*, dan optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk memaksimalkan pencapaian nilai kinerja anggaran, baik dari segi output, efisiensi, penyerapan, konsistensi, dan lainnya.

Rencana Aksi Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran**.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Utama (Itama) Tahun 2023 atas penilaian SAKIP untuk Tahun 2022 dan 2023 sesuai Nota Dinas No.32/ND/XI.2/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan nilai sebesar **88,90** dengan predikat **A (Memuaskan)** lebih rendah dari pencapaian Tahun 2021 sebesar **94,25**, dengan predikat **AA (sangat Memuaskan)**. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan nilai sebesar **88,90** dengan predikat **A (Memuaskan)**, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”, yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Nilai AKIP Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai tahun sebelumnya disebabkan karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya sebagai dampak adanya penerapan peraturan yang baru.

Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap empat komponen akuntabilitas kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan satker penyelenggara SAKIP dalam bentuk penilaian mandiri sebelum direviu oleh Itama dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri AKIP.

**B. Capaian Kinerja**

**1. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023**

Selama Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sesuai RKP termasuk pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
- b. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada bulan Juni dan Desember 2023, dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah dengan pemerintah daerah pada bulan Juli dan Desember 2023;
- c. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan baik oleh pemeriksa maupun pelaksana seperti Aplikasi SiAP, SMP, SISDM, SIPTL, JASMIN dan Kelola Tugas termasuk *updating* data kepegawaian pada Aplikasi SISDM;
- d. Telah menyelesaikan penyusunan Replikasi *Best Practice* terkait Pembuatan Formulir Administrasi Terpadu Penunjang Pemeriksaan dan Penilaian (Form AT P3), dan telah melaksanakan empat aktivitas manajemen pengetahuan, yaitu melaksanakan diklat pemeriksaan LKPD pada bulan Januari 2023, mengadakan kegiatan KTF dengan tema Pengaturan Proses Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa pada bulan Mei 2023, *mentoring* CPNS dengan tema “Belum optimalnya media penyampaian keseluruhan informasi layanan keuangan dan perbendaharaan pada elektronik Anjungan Multi Pelayanan



Perbendaharaan (e-AMPERA) yang memengaruhi efektivitas penggunaan layanan” pada September 2023, serta kegiatan reviu pasca aktivitas pada Desember 2023;

- e. Melaksanakan pengembangan kompetensi berupa diklat baik diklat teknis maupun diklat non teknis dalam rangka pemenuhan jam diklat pegawai, seminar, *workshop* dan *forum group discussion* (FGD).
- f. Melaksanakan kegiatan yang telah tercantum pada RKP dan RKSP untuk kemudian dilakukan penilaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran secara triwulanan dan tahunan yang dilakukan oleh Biro Keuangan.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 mencapai skor kinerja sebesar **99,89**. Skor ini mengalami kenaikan sebesar **0,02** jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar **99,87**. Target dan realisasi kinerja Tahun 2023 tercantum pada **Tabel 3.1**

No	Indikator Kinerja Utama 2023		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Status Target	Skor
<b>SKOR KINERJA KESELURUHAN</b>						<b>99,89</b>
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	88,67%	Tidak Mencapai Target	88,67
2	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	Tercapai	100,00
3	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,34%	Melebihi Target	105,00
4	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,74%	Melebihi Target	100,74
5	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	Tercapai	100,00
6	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,94%	Melebihi Target	100,94
7	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,74	Tidak Mencapai Target	94,80
8	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	88,90	Tidak Mencapai Target	99,89
9	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	96,28%	Tidak Mencapai Target	98,25
10	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,00%	Tercapai	100,00
11	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,75	Tidak Mencapai Target	98,68
12	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	Tercapai	100,00
13	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	91,19%	Melebihi Target	103,04

**Tabel 3.1.** Target dan Realisasi Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

## 2. Capaian Kinerja selama Lima Tahun Terakhir (Tahun 2019 s.d. 2023)

Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 s.d 2023 dirinci pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.3, berikut

Uraian	Skor				
	2023	2022	2021	2020	2019
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	99,89	99,87	100,43	98,58	95,36

**Tabel 3.2.** Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2023 dengan Skor Tahun 2019 s.d. 2023



**Gambar 3.1.** Grafik Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2019 s.d. 2023 (5 Tahun terakhir)

## 3. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir (Tahun 2020 s.d. 2023)

Capaian kinerja jika dibandingkan selama tiga tahun terakhir (2020 s.d. 2023) mengalami kenaikan dari **98,58** pada Tahun 2020 menjadi **100,43** pada Tahun 2021, dan menurun di Tahun 2022 menjadi sebesar **99,87** serta naik di Tahun 2023 menjadi **99,89** Indikator yang diukur Tahun 2023 sama dengan indikator Tahun 2021 dan 2022. Pencapaian indikator kinerja selama tiga tahun terakhir digambarkan, sebagai berikut:

- Terdapat tiga IKU Tahun 2020 s.d. 2022 yang mencapai target 100%, yaitu IKU 2-Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan, IKU 5-Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan IKU 12-Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Sedangkan untuk IKU 10-Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan selama tiga tahun terakhir telah mencapai target, namun pada Tahun 2021 terjadi pelampauan target hingga 225%, hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilakukan terkait hasil kegiatan aktualisasi CPNS tahun 2021. Sedangkan untuk Tahun 2023 terdapat empat IKU yang telah mencapai target 100%, untuk IKU 3, IKU 4, IKU 6, dan IKU 13 telah melampaui target, sedangkan lima IKU lainnya tidak mencapai target.
- IKU 3-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, pencapaiannya meningkat dalam periode Tahun 2020 s.d. 2023, yaitu ditargetkan Tahun 2020-2023 sebesar 75%, telah direalisasikan pada Tahun 2020 sebesar 70,79%, Tahun 2021 sebesar 84,23%, Tahun 2022 sebesar 85,67%, dan Tahun 2023 sebesar 86,34%. Kenaikan realisasi IKU ini disebabkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Kepala Perwakilan untuk meningkatkan IKU 3 ini. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemda selain dari kegiatan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan secara rutin setiap semester.

- c. IKU 7-Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK ditargetkan Tahun 2020-2022 sebesar 5,00 (**sangat memuaskan**), telah direalisasikan Tahun 2020 sebesar 4,41, Tahun 2021 sebesar 4,45, Tahun 2022 sebesar 4,66, dan Tahun 2023 sebesar 4,74 dengan tren yang semakin meningkat. IKU ini untuk mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK. Realisasi selama tiga tahun terakhir memperoleh predikat '**sangat memuaskan**' dengan skor yang cenderung meningkat setiap tahunnya.
- d. IKU 8-Hasil Evaluasi AKIP, merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Realisasi Tahun 2020 mencapai nilai 88,63, Tahun 2021 sebesar 89,11, dan Tahun 2022 sebesar 94,25. Realisasi IKU ini selama tiga tahun terakhir telah mencapai kategori "**memuaskan**" dengan skor yang semakin meningkat. Peningkatan ini dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk melengkapi kekurangan penilaian sesuai rekomendasi Itama. Sedangkan Tahun 2023, realisasi IKU sebesar 88,90 dibawah target sebesar 89,00 karena terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya.
- e. IKU 4 dan IKU 6 terkait Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal selama tiga tahun terakhir telah mencapai target 100%, dan Tahun 2022 mendapatkan tambahan skor dari Direktorat PSMK sebesar 0,77% untuk tematik nasional, sehingga tematik nasional tercapai melebihi target sebesar 100,77%, dan penambahan skor sebesar 1,18% untuk tematik lokal, sehingga skor tematik lokal menjadi sebesar 101,18%. Untuk Tahun 2023 realisasi IKU ini tercapai sesuai target sebesar 100%, dan terdapat penambahan skor sebesar 0,74 untuk tematik nasional dan 0,94 untuk tematik local, sehingga menjadi sebesar 100,74% dan 100,94%.
- f. Tahun 2013 untuk IKU 1-Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, IKU 9-Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan IKU 11-Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi tidak mencapai target dengan skor masing-masing sebesar 88,67, sebesar 98,25, dan sebesar 98,68. Sedangkan IKU 10-Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terealisasi sesuai target sebesar 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d. 2023, tertera pada **Tabel 3.3** dibawah ini.

No	Indikator Kinerja Utama 2021		Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
<b>SKOR KINERJA KESELURUHAN</b>			<b>98,58</b>		<b>100,43</b>		<b>99,87</b>		<b>99,89</b>	
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>										
1	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,89%	100%	92,63%	100%	87,37%	100%	88,67%
2	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,79%	75%	84,23%	75%	85,67%	75%	86,34%

No	Indikator Kinerja Utama 2021	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
4	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100,31%	100%	100,77%	100%	100,74%
5	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100,56%	100%	101,18%	100%	100,94%
7	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,41	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,45	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,66	(Sangat Memuaskan) 5,00	(Sangat Memuaskan) 4,74
8	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	86	88,63	87	89,11	88	94,25	89	88,90
9	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,90%	96%	98,90%	97%	94,32%	98%	96,28%
10	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	225%	100%	100%	100%	100%
11	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,78	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,85	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,74	(Memuaskan) 3,80	(Memuaskan) 3,75
12	IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	90,59%	87,50%	90,32%	88%	89,90%	88,50%	91,19%

Tabel 3.3. Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2023

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja Akhir Periode Renstra Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target kinerja akhir Renstra Tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Penetapan target kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2024 sebagian besar sama, namun terdapat dua target IKU Tahun 2024 yang ditetapkan lebih tinggi dari Tahun 2023, yaitu IKU 8-Hasil Evaluasi AKIP pada akhir periode Renstra dengan target sebesar 90,00%, IKU 9-Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasindengan tar=rget sebesar 98,50%, dan IKU 13-Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran pada akhir periode Renstra dengan target sebesar 89,70%.
- b. Jika dilihat dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2023 untuk IKU 3-Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, realisasinya telah melampaui target Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 86,34%, dari target renstra sebesar 75%, sehingga capaian pada akhir periode renstra diharapkan juga dapat melebihi target. Sedangkan pencapaian realisasi IKU 13-Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran telah melampaui target Renstra Tahun 2024 sebesar 91,19% dari target sebesar 89,70%.

Rincian target kinerja pada periode Renstra Tahun 2020-2024 pada Tabel 3.4

## Laporan Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>INDIKATOR KINERJA GENERIK</b>								
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		8	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95	96	97	98	98,50
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,50%	89,70%

**Tabel 3.4.** IKU dan Target Pencapaiannya Tahun 2020-2024

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahunan (2024), sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88,67%	Tidak Mencapai Target
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	86,34%	Melampaui Target
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,74%	Melampaui Target
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,94%	Melampaui Target
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,74	Tidak Mencapai Target

No	Indikator Kinerja	Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (88,90)	Tidak Mencapai Target
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00	96,00	97,00	98,00	98,50	96,28%	Tidak Mencapai Target
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,75)	Tidak Mencapai Target
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
13.	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,50%	88%	88,50%	89,70%	91,19%	Melampaui Target

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahunan

### 5. Perkembangan Capaian IKU Tahun 2020 s.d. 2024

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	88,89%	92,63%	87,37%	88,67%	
Capaian	88,89	92,63	87,37	88,67	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	<b>88,89%</b>	<b>92,63%</b>	<b>87,37%</b>	<b>88,67%</b>	

Realisasi IKU.1-Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2023 adalah sebesar 88,67% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 88,67. Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan IKU ini sebesar Rp15.921.642.000,00, dengan realisasi sebesar Rp15.834.693.445,00 atau sebesar 99,45%. IKU ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan dan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pada tiga sub penilaian, yaitu internal satker melalui QA dan QC dan eksternal satker melalui hasil evaluasi Direktorat EPP. Bobot penilaian untuk QA dan QC sebesar 40% dan hasil evaluasi Direktorat EPP sebesar 60%.

Nilai QA dan QC berdasarkan aktivitas pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan panduan pemeriksaan dan melakukan pengisian lembar revidu pelaksanaan pemeriksaan oleh Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat selaku PSP, dan Pengendali Mutu (Penanggung Jawab), Pengendali Teknis dan Ketua Tim selalu PFP yang telah terpenuhi 100%. Sedangkan evaluasi Direktorat EPP terkait akurasi dan konsistensi LHP.

Nilai IKU ini Tahun 2023 adalah sebesar 88,66% dari target sebesar 100% lebih tinggi dari pencapaian Tahun 2022, namun masih di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlunya dilakukan perbaikan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Untuk mendorong peningkatan capaian IKU ini, akan diupayakan peningkatan kualitas pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga kesalahan akurasi dan konsistensi terhadap LHP yang disusun dapat diminimalisir, diantaranya dengan melakukan revidu silang atau pengecekan kembali LHP sebelum dinyatakan net dan diserahkan kepada entitas baik oleh para Ketua Tim maupun Tim Revidu. Selain itu, memaksimalkan Tim Revidu LHP yang bertugas merevidu temuan KHP dari sisi penulisan dan substansi dan membentuk Tim Teknis *Audit* yang

bertugas memberikan pendapat dan masukan atas TP, dan diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

IKU. 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	

Realisasi IKU.2-Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2023 sebesar 100%, yang menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2), serta diharapkan satker pemeriksaan akan terus meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan. Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan IKU ini sebesar Rp15.921.642.000,00, dengan realisasi sebesar Rp15.834.693.445,00 atau sebesar 99,45%. Realisasi IKU ini Tahun 2023 telah mencapai 100% sama dengan target Tahun 2024. Diharapkan target IKU ini dapat dipertahankan sampai Tahun 2024.

IKU. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	70,79%	84,23%	85,67%	86,34%	
Capaian	94,39	105	105	105	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	94,39%	112,31%	114,13%	115,12%	

Realisasi IKU.3-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 adalah sebesar 86,34% dari target sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 105. Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan IKU ini sebesar Rp227.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp226.475.000,00 atau 99,53%. Hal ini mengindikasikan capaian IKU ini telah melebihi target. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya percepatan tindak lanjut bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk memacu peningkatan prosentase penyelesaian tindak lanjut dan mendorong pemda untuk lebih optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Realisasi IKU ini telah melebihi target Tahun 2023 dan target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan hingga Tahun 2024.

IKU. 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,31%	100,77%	100,74%	
Capaian	100,55	100,31	100,77	100,74	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100,31%	100,77%	100,74%	

Realisasi IKU.4-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2023, yang telah dilaksanakan pada Semester II. IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D) dan SDG's. Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan IKU ini adalah sebesar Rp1.069.549.000,00, dengan realisasi sebesar Rp1.069.045.858,00 atau 99,95%. Realisasi IKU ini sebesar

100% mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berhasil merealisasikan seluruh rencana pemeriksaan kinerja khususnya tematik nasional dalam RKA perwakilan. Untuk Tahun 2023 terdapat penambahan skor atas IKU ini sebesar 0,74 sehingga menjadi 100,74%, serta mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini, akan diusahakan untuk melaksanakan semua pemeriksaan kinerja sesuai dengan rencana pada RKA.

IKU. 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	

Realisasi IKU.5-Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 adalah sebesar 100% telah tercapai sesuai target. IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Peningkatan pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Selama Tahun 2023, tidak ada permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH, namun atas IKU ini tetap diberikan nilai 100%.

IKU. 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,56%	101,18%	100,94%	
Capaian	100	100,56	101,18	100,94	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100,56%	101,18%	100,94%	

Realisasi IKU.6-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2023 telah direalisasikan sebesar 100% sesuai target, yang mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berhasil merealisasikan seluruh rencana pemeriksaan tematik lokal sesuai RKA perwakilan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp1.833.327.000,00, telah direalisasikan sebesar Rp1.824.550.570,00 atau sebesar 99,52%. Untuk Tahun 2023 terdapat penambahan skor atas IKU ini sebesar 0,94, sehingga menjadi 100,94%. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan yang dilakukan sesuai kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau yang menjadi tujuan pembangunan dalam RPJMD.

IKU ini untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang telah disusun. Pencapaian ini diperoleh dari adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa untuk dapat memenuhi pemeriksaan tematik lokal ini. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKU ini, akan diupayakan untuk melaksanakan semua pemeriksaan kinerja tematik lokal sesuai rencana. Diharapkan pencapaian IKU ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada Tahun 2024.



IKU. 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,41	4,45	4,66	4,74	
Capaian	88,20	89	93,20	94,80	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	<b>88,20%</b>	<b>89%</b>	<b>93,20%</b>	<b>94,80%</b>	

Realisasi IKU.7- Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,00 dan telah direalisasikan sebesar 4,74. IKU ini untuk mengukur pemahaman atas visi, misi, dan nilai dasar BPK oleh seluruh pegawai yang dilakukan melalui survei, selain itu juga merupakan dasar pemahaman budaya organisasi BPK. Survei dilakukan oleh *surveyor* independen dengan PIC Direktorat PSMK. Realisasi IKU ini yang hanya 94,80% mengindikasikan bahwa masih terdapat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang belum memahami nilai dasar BPK secara baik dan atau masih ada pegawai yang tidak mengisi survei penilaian IKU ini.

Untuk mendorong peningkatan capaian IKU ini, akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pemahaman akan nilai-nilai dasar BPK dan bagaimana juga pengimplementasiannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama bagi pegawai baru, sehingga tujuan IKU ini untuk mengembangkan budaya organisasi dapat tercapai.

IKU. 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,00)
Realisasi	A (88,63)	A (89,11)	AA (94,25)	A (88,90)	
Capaian	103,06	102,43	105	99,89	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	<b>98,42%</b>	<b>98,96%</b>	<b>104,72%</b>	<b>98,78%</b>	

Realisasi IKU.8-Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yang dilakukan oleh Itama sebesar 88,90 lebih rendah dari target sebesar 89,00 atau dengan pencapaian 99,89, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”, yaitu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Nilai AKIP Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai tahun sebelumnya disebabkan terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaiannya sebagai dampak adanya penerapan peraturan yang baru. Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap empat komponen akuntabilitas kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan satker penyelenggara SAKIP dalam bentuk penilaian mandiri sebelum direviu oleh Itama dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri AKIP. Selain adanya perubahan metode penilaian AKIP yang merupakan penyebabnya perolehan nilai kinerja Tahun 2022 dan 2023 yang lebih rendah dari Tahun 2021, juga terdapat beberapa dokumen penilaian yang belum disusun oleh perwakilan seperti *cascading* SKP.

Untuk Tahun 2024 akan diupayakan agar perolehan nilai AKIP dapat mencapai target, antara lain dengan melengkapi kekurangan dokumen penilaian, dan peningkatan nilai capaian IKU ini.

IKU.9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,50%
Realisasi	98,90%	98,90%	94,32%	96,28%	
Capaian	104,11	103,02	97,23	98,25	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100,41%	100,41%	95,76%	97,75%	

Realisasi IKU.9-Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2023 adalah sebesar 96,28% dibawah target sebesar 98% atau dengan capaian sebesar 97,75. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan TI berupa pemanfaatan Aplikasi SISDM, Aplikasi JASMIN, Aplikasi SIAP, Aplikasi SMP, dan Aplikasi SIPTL dalam pelaksanaan tugas pegawai.

IKU ini bertujuan untuk mendorong *IT Culture* di lingkungan BPK dan mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Realisasi IKU yang masih dibawah target, mengindikasikan masih adanya pegawai yang belum memaksimalkan penggunaan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

Adapun rincian pencapaian untuk pemanfaatan Aplikasi SISDM sebesar 98,40%, Aplikasi JASMIN sebesar 95,00%, Aplikasi SMP sebesar 97,26%, Aplikasi SIAP sebesar 91,93%, dan Aplikasi SIPTL sebesar 98,05%. Kepala Perwakilan akan menghimbau pegawai untuk lebih optimal dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terutama pemanfaatan Aplikasi SISDM, Aplikasi JASMIN, Aplikasi SIAP, Aplikasi SMP, dan Aplikasi SIPTL dan melakukan koordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro Teknologi Informasi agar target Tahun 2024 dapat tercapai.

IKU. 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	225%	100%	100%	
Capaian	100	105	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	105%	100%	100%	

Realisasi IKU.10-Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2023 sebesar 100% tercapai sesuai target. Kegiatan yang telah dilaksanakan s.d. Triwulan IV ini adalah Diklat Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 pada bulan Januari 2023, kegiatan KTF pada bulan Mei 2023, dan *Mentoring* CPNS pada bulan September 2023, serta kegiatan revidu pasca aktivitas pada bulan Desember 2023. Adapun kegiatan KTF Tahun 2023 dibiayai dari anggaran Biro Sumber Daya Manusia BPK RI. Sedangkan untuk *best practice* telah selesai disusun replika *best practice* pada September 2023 dengan topik Pembuatan Formulir Administrasi Terpadu Penunjang Pemeriksaan dan Penilaian (Form AT P3) yang telah mendapat persetujuan Direktorat EPP-Ditama Renvaja.

Manajemen pengetahuan merupakan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam organisasi. Proses identifikasi mencakup praktik terbaik (*best practice*) dan aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan selama satu tahun. Pencapaian target 100% ini menunjukkan bahwa seluruh komponen aktivitas

yang dinilai telah terpenuhi. Ketercapaian tersebut karena adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Kepala Perwakilan dan Tim Pemeriksa untuk dapat memenuhi IKU ini. Untuk kedepannya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat mempertahankan skor IKU ini hingga Tahun 2024 dengan menjadwalkan secara periodik kegiatan-kegiatan manajemen pengetahuan ini.

IKU. 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)	Memuaskan (3,8)
Realisasi	Memuaskan (3,78)	Memuaskan (3,85)	Memuaskan (3,74)	Memuaskan (3,75)	
Capaian	99,47	101,32	98,42	98,68	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	99,47%	101,32%	98,42%	98,68%	

Realisasi IKU.11-Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2023 tidak mencapai target, hanya tercapai 3,75 atau 98,68% dari target sebesar 3,80. IKU ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Penilaiannya dilakukan melalui survei oleh *surveyor* independen. Pencapaian realisasi dibawah target mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya kualitas komunikasi antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan *stakeholder*.

Untuk meningkatkan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan akan lebih optimal untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder*, serta memastikan pelaksanaan survei telah diikuti oleh seluruh pegawai, atau dengan melakukan FGD atau Dengar Pendapat untuk menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan dari para pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

IKU. 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	100	100	100	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	

Realisasi IKU.12-Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 adalah sebesar 100% sesuai target. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp49.002.147,00. Pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan yakni pegawai pemeriksa dan non pemeriksa.

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014, pegawai non pemeriksa (staf maupun pejabat struktural) pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan harus menyelesaikan paling tidak 20 jam pendidikan dalam satu tahun. *Cut off* perhitungan jumlah jam diklat pegawai adalah 30 Juni.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 Juni, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 Juni, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. IKU ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan juga bagi pegawai penunjang. Keberhasilan pencapaian IKU ini dikarenakan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Kepala Perwakilan, Subbag SDM dan kesadaran dari seluruh pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan.

Upaya yang dilakukan adalah dengan memantau keikutsertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi setiap triwulan oleh Subbag SDM. Bagi pegawai yang belum dapat ikut diklat baik *daring* ataupun *luring*, Badiklat PKN telah menyediakan di *e-learning* untuk diklat secara mandiri dan sertifikatnya langsung terbit setelah selesai diklat. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, diharapkan target IKU ini dapat dipertahankan pada Tahun 2024.

IKU. 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	89,70%
Realisasi	90,59%	90,32%	89,90%	91,19%	
Capaian	104,12	103,22	102,16	103,04	
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 terhadap Target Tahun 2024	<b>100,99%</b>	<b>100,69%</b>	<b>100,22%</b>	<b>101,66%</b>	

Realisasi IKU.13-Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar 91,19% dari target sebesar 88,50% atau dengan capaian 103,04. IKU ini terdiri dari dua komponen, yaitu Indikator Kinerja Tingkat Implementasi Anggaran (EPA) dengan nilai sebesar 98,50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (EKA) dengan nilai sebesar 86,32%. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Kepala Perwakilan dan kepala unit kerja terkait langsung dengan pencapaian IKU ini dalam merealisasikan kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2023 baik yang tercantum dalam RKP maupun RKSP, sehingga pengelolaan anggaran perwakilan telah tercapai secara optimal.

Untuk kedepannya, nilai IKU ini akan dipertahankan bahkan akan ditingkatkan dengan tetap memegang komitmen yang tinggi, yaitu dengan melaksanakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja anggaran, baik dari sisi penyerapan anggaran, output, efisiensi, ketepatan dalam menyampaikan LPJ, dan lain-lain.

### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategi Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* secara umum telah dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud, antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, dan efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Efisiensi yang dilakukan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi adalah dengan adanya penggunaan aplikasi *zoom meeting online* untuk kegiatan *entry briefing* pemeriksaan dengan entitas, pembahasan *action plan* atas Konsep Hasil Pemeriksaan, mengikuti rakor, diklat, *workshop* dan pengarahan pimpinan, sehingga dapat mengurangi biaya kegiatan rapat berupa jamuan rapat (*snack* dan makan siang) dan perjalanan dinas luar kota.
- b. Efisiensi sumber daya teknologi dan informasi, BPK melalui Biro Teknologi Informasi telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SIPTL, penggunaan *Big Data Analytics*) dan aplikasi non pemeriksaan seperti Jasmin, Kelola Tugas, SISDM, serta pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.
- c. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, pemanfaatan aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segi waktu dan biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK, contohnya dengan adanya aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, para pemeriksa BPK dan juga *auditee* tidak lagi harus datang langsung ke kantor BPK untuk melakukan pemutahiran data tindak lanjut, *auditee* bisa setiap saat meng-input dokumen-dokumen tindak lanjut diaplikasi SiPTL ini baik di kantor *auditee* atau di tempat lainnya.
- d. Pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) pada kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN, dapat mengefisienkan waktu dan biaya diklat.

#### 2. Pengelolaan BMN

- a. Penggunaan *QR Code* BMN untuk mempermudah pengawasan BMN di setiap ruang kerja, sehingga posisi dan jenis BMN yang tersebar disemua ruangan dapat diketahui. Penggunaan *QR Code* BMN menjadi lebih efisien dalam hal pengawasannya dan penghematan penggunaan kertas.
- b. Melakukan penghapusan dokumen dengan pemusnahan dokumen perwakilan yang telah melewati batas waktu penghapusannya, untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan pengelolaan dokumen.
- c. Melakukan renovasi ruangan untuk lebih memaksimalkan penggunaan ruangan terutama subauditorat dan ruangan rapat, sehingga cukup menampung pegawai baru dan tamu saat pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah yang mengundang entitas ke kantor perwakilan.

### 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa kebijakan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran tanpa mengganggu kinerja perwakilan, yaitu telah dilakukan pengendalian belanja operasional meliputi belanja bahan, honorarium, perjalanan dinas, *konsinyering* dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat antara lain pada beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Diklat, Seminar, FGD dan sejenisnya secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*, sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran seperti belanja bahan (penggunaan ATK, jamuan snack dan makan siang), honor narasumber, biaya perjalanan dinas (uang harian, akomodasi, biaya taxi dan tiket pesawat/kendaraan).
- b. Pelaksanaan Kegiatan *Konsinyering* Penyusunan LHP, Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Semester I dan II Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

### D. Perubahan Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan budaya kerja dengan semboyan "**BPK Sumsel PACAK**" (Profesional, Amanah, Cermat, Adaptif, Kolaboratif), yang merupakan inovasi pendukung perolehan predikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** yang diperoleh Tahun 2022 dan telah menjadi budaya kerja baru yang diterapkan di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan No.19/K/XVIII.PLG/03/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Budaya kerja "**BPK Sumsel PACAK**" yang diartikan sebagai bisa, pandai, cakap, telah terlatih atau mahir dalam mengerjakan sesuatu, sedangkan PACAK adalah singkatan dari **Profesional, Amanah, Cermat, Adaptif, dan Kolaboratif**, sehingga bermakna seluruh Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah secara profesional, amanah, cermat, adaptif, dan kolaboratif. Adapun makna PACAK sendiri, adalah sebagai berikut:

**P** adalah **Profesional**, artinya *setiap individu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kualitas tinggi dalam bekerja dan terus belajar mengembangkan kapabilitas.*

**A** adalah **Amanah**, artinya *setiap individu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memegang teguh kepercayaan yang diberikan.*

**C** adalah **Cermat**, artinya *setiap individu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pekerjaan secara teliti, hati-hati dan penuh minat.*

**A** adalah **Adaptif**, artinya *setiap individu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan.*

**K** adalah **Kolaboratif**, artinya *setiap individu pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mampu membangun kerjasama yang sinergis.*

Dengan dibentuknya budaya kerja "BPK Sumsel PACAK" pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, memberikan perubahan/perbaikan pada beberapa indikator kinerja, antara lain:

1. Realisasi IKU 3-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan meningkat selama tiga tahun terakhir, yaitu Tahun 2021 sebesar 84,23%, Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 85,67% dan Tahun 2023 menjadi sebesar 86,34%
2. Realisasi IKU 7-Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang meningkat Tahun 2021 sebesar 4,45 menjadi sebesar 4,66 pada Tahun 2022, dan meningkat lagi di Tahun 2023 menjadi sebesar 4,74.

#### E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian kinerja Tahun 2023, telah dialokasikan anggaran dan telah direalisasikan anggaran, *output*, dan indikator kinerja Tahun 2023 berdasarkan Data Prisma Pelaporan dengan realisasi s.d. Desember 2023, pada Tabel 3.5 berikut:

No	Anggaran (Setelah Perubahan) (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Rincian Output	Indikator Kinerja
1.	11.669.116.000,00	11.656.682.482,00	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP LKPD
2.	107.928.000,00	107.927.900,00	LHP atas Bantuan Keuangan Parpol	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol (Banparpol)
3.	-	-	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK
4.	6.138.000,00	4.978.592,00	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat
5.	61.368.000,00	61.272.406,00	Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP
6.	1.560.000,00	1.560.000,00	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas
7.	227.555.000,00	226.475.000,00	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
8.	275.000.000,00	271.626.170,00	Laporan Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah
9.	4.252.526.000,00	4.178.010.963,00	LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan
10.	442.100.000,00	437.401.538,00	Layanan Manajemen Pemeriksaan Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan
11.	1.560.603.000,00	1.481.009.480,00	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan
12.	13.534.425.000,00	13.531.753.330,00	Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan
13.	5.878.804.000,00	5.866.449.880,00	Layanan Perkantoran	Realisasi Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Data Prisma Pelaporan (Realisasi s.d. Desember 2023)

Tabel 3.6. Anggaran, *output*, dan Indikator Kinerja Tahun 2023

## F. Inovasi

**Inovasi-inovasi yang telah diterapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:**

1. **BPK Lebih Dekat**, yang meliputi Satgas PPG dan WBS, Tim Penanganan Pengaduan, Rumah Limas dan *Hotline Whatsapp*, yang merupakan lingkungan pengendalian yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. **Template Penyusunan LHPt Kerugian Daerah**, yang merupakan panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada entitas.
3. **Prosedur Pengisian SiPTL**, yang merupakan petunjuk teknis pemantauan tindak lanjut pada Aplikasi SiPTL.
4. **Anjungan Multi Pelayanan Perbendaharaan (e-AMPERA)**, merupakan Aplikasi *Chatbot Whatsapp Business* (0858-4085-0876) berisi layanan perbendaharaan, meliputi pelayanan tagihan, konsultasi (*helpdesk*), permintaan uang muka, rekonsiliasi data keuangan, informasi tagihan, penyusunan dan revisi anggaran.
5. **PEGI BAE**, mencakup aplikasi perjalanan dinas, MoU Hotel di wilayah Sumatera Selatan, MoU dengan penyedia BBM, dan MoU dengan PT Garuda Indonesia.
6. **Pojok Yustitia**, merupakan fasilitas pelayanan konsultasi dan informasi hukum dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana komunikasi, yaitu ruang diskusi, perpustakaan hukum portal BPK, email, *whatsapp*, telepon, dan *google form*.
7. **Notifikasi Presensi**, merupakan *chabot whatsapp* pada grup *whatsapp* BPK Sumsel dan rekaman pengingat presensi yang disiarkan melalui pengeras suara pada waktu masuk dan pulang kantor sebagai pengingat presensi bagi pegawai.

Dampak dari inovasi tersebut, antara lain:

1. Mitigasi risiko atas pelanggaran nilai dasar BPK-IIP
2. Pelayanan publik menjadi lebih nyaman
3. Penyajian LHPt menjadi lebih seragam, dan proses penyelesaian LHPt menjadi lebih cepat.
4. Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semakin meningkat.
5. Pelayanan keuangan lebih cepat, nyaman, mudah, dan dapat diakses kapan saja.
6. Memudahkan pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih cepat dan mudah.
7. Konsultasi hukum menjadi lebih cepat, mudah, dan nyaman.
8. Prosentase pegawai yang lupa melakukan presensi menurun angkanya.

Sejalan dengan *roadmap e-goverment*, teknologi dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran termasuk pengelolaan BMN, dan sejak periode penilaian IKU Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dan menggunakan Replikasi *Best Practice* terkait Pengembangan *Monitoring* Barang Milik Negara pada Daftar Barang



Ruangan (DBR) melalui Sistem *Quick Response (QR) Code* dan Tahun 2023 dengan Replikasi *Best Practice* untuk Pembuatan Formulir Administrasi Terpadu Penunjang Pemeriksaan dan Penilaian (Form AT P3).

BPK Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan aplikasi berbasis *Mobile Application* menggunakan *Quick Response (QR) Code* untuk mempermudah pengawasan BMN di setiap ruang kerja. Aplikasi ini mampu mencatat kondisi dan lokasi suatu aset atau BMN secara *real time* pada *database* yang sudah disiapkan. Aplikasi ini dibuat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang sering ditemukan pada kegiatan inventarisasi BMN. Manfaat dari aplikasi ini adalah untuk menyajikan informasi BMN sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pengembangan monitoring menggunakan aplikasi *QR Code* ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu memutakhirkan *list* Daftar Barang Ruangan, menyusun *QR Code* DBR yang sudah mutakhir, membuat *database* dan aplikasi Kelola DBR yang akan terintegrasi dengan *QR Code*, dan memasang *QR Code* DBR untuk barang ruangan.

Selain itu, replikasi *best practice* lainnya yang diterapkan Tahun 2023 berupa pembuatan FormAT P3 yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah para pemeriksa dalam membuat formulir SP2P, SKPP, dan PKPP dalam bentuk standar sesuai juknis, sehingga pengelolaan administrasi menjadi lebih tertib, meminimalisir kesalahan penulisan nama entitas, tahun yang diperiksa, dan data pegawai yang melaksanakan pemeriksaan. FormAT P3 dapat dengan mudah diterapkan karena berbasis excel, tidak membutuhkan biaya banyak, dan diharapkan untuk masa mendatang dapat dikembangkan dengan basis *Web*.

## G. Perhargaan

Selama Tahun 2023, selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan juga telah meraih beberapa penghargaan:

1. Tanggal 28 Februari 2023 telah meraih prestasi Peringkat Pertama Penilaian Penyelesaian LPJ Bendahara Terbaik Pertama Kategori Pagu Sedang Periode Semester II Tahun 2022 Satuan Kerja Lingkup KPPN Palembang dari KPPN Palembang



2. Tanggal 5 Oktober 2023 telah meraih *SDM Award 2023* berupa Terbaik II Kategori Pengelolaan DUPAK JFP dari Sekretaris Jenderal BPK RI.



3. Tanggal 23 Oktober 2023 menerima penghargaan Terbaik Kedua Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Tahun 2022 dari Sekretaris Jenderal BPK RI.



4. Tanggal 31 Oktober 2023 memperoleh BEST TRANSACTION BNIDIRECT dari PT Bank BNI (Persero) Tbk.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pencapaian skor kinerja Tahun 2023 sebesar **99,89**. Skor ini mengalami kenaikan sebesar **0,02** jika dibandingkan dengan periode Tahun 2022 sebesar **99,87**.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja, antara lain:

1. IKU 2-Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan terealisasi 100% dengan capaian 100% dari target Tahun 2023, dan sama dengan realisasi Tahun 2022.
2. IKU 4-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terealisasi 100,74% dengan capaian 100,74% dari target Tahun 2023, dan menurun 0,03 poin dari realisasi Tahun 2022 sebesar 100,77%.
3. IKU 5-Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan terealisasi 100% dari target Tahun 2023, dan sama dengan realisasi Tahun 2022.
4. IKU 6-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal terealisasi 100,94% dengan capaian 100,94% dari target Tahun 2023, dan menurun 0,24 poin dari realisasi Tahun 2022 sebesar 101,18%.
5. IKU 10-Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan terealisasi 100% dari target Tahun 2023, dengan capaian 100%, sama dengan realisasi Tahun 2022.
6. IKU 12-Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, terealisasi 100% dengan capaian 100% sesuai target, sama dengan realisasi Tahun 2022.
7. Terdapat empat IKU yang pencapaiannya melebihi target Tahun 2023, yaitu:
  - a. IKU 3-Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terealisasi sebesar 86,34% dari target sebesar 75% dengan capaian 105%, naik 0,67 dari Tahun 2022 sebesar 85,67%
  - b. IKU 4-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional terealisasi 100,74% dengan capaian 100,74 dari target sebesar 100%, namun menurun 0,03 poin dari realisasi Tahun 2022 sebesar 100,77%
  - c. IKU 6-Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal terealisasi 100,94% dengan capaian 100,94% dari target Tahun 2023 sebesar 100%, namun menurun 0,24 poin dari realisasi Tahun 2022 sebesar 101,18%
  - d. IKU 13-Tingkat Kinerja Anggaran yang terealisasi sebesar 91,19% dari target 88,50% atau dengan capaian 103,04% naik 1,29 poin dari Tahun 2022 sebesar 89,90%.

Sedangkan indikator kinerja yang belum mencapai target, sebagai berikut:

1. IKU 1-Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2023 terealisasi sebesar 88,67% dengan capaian 88,67, dari target sebesar 100%, namun meningkat 1,30 poin dari Tahun 2022 sebesar 87,37%.
2. IKU 7-Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK terealisasi Tahun 2023 sebesar 4,74 dari target sebesar 5,00 atau tercapai 94,80%, meningkat dari Tahun 2022 sebanyak 0.08 poin atau sebesar 4,66.
3. IKU 8-Hasil Evaluasi AKIP terealisasi sebesar 88,90 dari target sebesar 89,00 dengan capaian 99,89%, menurun 5,35 poin dari Tahun 2022 sebesar 94,25.
4. IKU 9-Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi terealisasi sebesar 96,28% dari target Tahun 2023 sebesar 98,00% dengan capaian sebesar 98,24%. Meningkat 1,96 poin dari Tahun 2022 sebesar 94,32%.
5. IKU 11-Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi terealisasi sebesar 3,75 dari target 3,80 atau dengan capaian sebesar 98,68%, meningkat 0,01 poin dari Tahun 2022 sebesar 3,74.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, diantaranya:

1. Masih ditemukannya kesalahan/kekeliruan terkait konsistensi dan akurasi LHP yang mempengaruhi nilai pencapaian IKU, yang disebabkan antara lain reviu berjenjang atas konsep LHP belum dilaksanakan secara optimal.
2. *Surveyor* Independen merahasiakan nama-nama pegawai yang sudah mengisi kuesioner PMPRB. Hal ini menyebabkan perwakilan kesulitan untuk memonitor siapa saja pegawai yang telah mengisi atau yang belum mengisi.
3. Proses validasi atas *update* data pada aplikasi SIPTL terutama untuk pejabat pusat membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga data prosentase TLRHP pada laporan *monitoring* triwulanan kinerja menggunakan data periode sebelumnya.
4. Masih adanya dokumen pendukung penilaian AKIP yang kurang atau belum ada, antara lain *cascading* kinerja pegawai mulai dari eselon II sampai eselon IV dan pegawai, dan penyajian laporan kinerja masih belum maksimal sesuai penilaian Itama.
5. Masih adanya pegawai yang belum memadai dalam penggunaan TIK, antara lain pada aplikasi JASMIN masih banyak yang belum menindaklanjuti disposisi dari atasan langsungnya. Selain itu, pemanfaatan beberapa aplikasi lain oleh pemeriksa dan penunjang belum maksimal.
6. Masih belum maksimalnya hasil survei terkait tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut, diantaranya:

1. Perlunya dilakukan perbaikan atas kualitas laporan hasil pemeriksaan dan peningkatan kualitas pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga kesalahan akurasi dan konsistensi terhadap LHP yang disusun dapat diminimalisir,

diantaranya dengan melakukan reviu silang atau pengecekan kembali LHP sebelum dinyatakan net dan diserahkan kepada entitas baik oleh para Ketua Tim maupun Tim Reviu. Selain itu, memaksimalkan Tim Reviu LHP yang bertugas mereviu temuan KHP dari sisi penulisan dan substansi dan membentuk Tim Teknis *Audit* yang bertugas memberikan pendapat dan masukan.

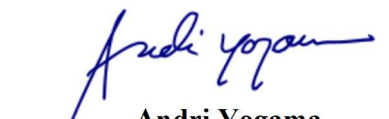
2. Melakukan sosialisasi atas implementasi nilai-nilai dasar BPK pada setiap even yang mengumpulkan seluruh pegawai perwakilan, dan memonitor serta memastikan seluruh pegawai telah mengisi survey PMPRB.
3. Memerintahkan seluruh pegawai untuk aktif dalam penggunaan aplikasi internal BPK, baik kegiatan kesekretariatan maupun kegiatan pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja dimasa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan langkah-langkah, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas LHP yang diterbitkan.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi (aplikasi internal BPK).
5. Menggali prestasi perwakilan yang dapat diterapkan untuk menjadi aktivitas manajemen pengetahuan.
6. Terus berupaya mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah memenuhi target serta juga akan meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang tidak memenuhi target.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2023 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan  
Kepala Perwakilan**

  
**Andri Yogama**  
NIP 197106061997031005

# LAMPIRAN

## Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anshu Yogana, S.E., M.M., Ak., CSFA.  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Slamet Karniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFA., IRMCP.  
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



```

graph TD
    A["ESELON I  
SASARAN PROGRAM  
Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif"]
    B["ESELON II  
SASARAN KEGIATAN  
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi"]
    C["SASARAN  
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas"]
    D["Meningkatnya Layanan Pemeriksaan"]
    
    A --- B
    B --- C
    B --- D
    
```

## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2023

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemantauan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengawasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dan Para Pemangku Kepentingan	100%
	6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8. Hasil Evaluasi AOP	A (89,00)
	9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10. Tingkat Penetapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13. Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,



Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA,  
CPA., CFA., ERMCP.

Pihak Pertama,



Andri Yohana, S.E., M.M., Ak., CSFA.



# Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

**Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun : 2023**

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolesan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40%	40%	60%	100%	Desember	<p><b>Januari 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)</li> </ul> <p><b>Februari 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapmping dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I.</li> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 2 entitas dan pemeriksaan interim LKPD atas 16 entitas</li> </ul> <p><b>Maret s.d. Mei 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</li> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapmping dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I.</li> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 18 entitas</li> </ul>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan QC. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PFP dan QA yang dilaksanakan oleh PSP</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapmping dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II.</li> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Pendahuluan Kinerja.</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapmping dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II.</li> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan terinci Kinerja dan pemeriksaan pendahuluan PDIT serta pemeriksaan terinci PDIT.</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaanyang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Pemeriksaan Tahun 2022.</li> <li>Melakukan evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 terhadap setiap LHP.</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022.</li> <li>Melakukan evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 terhadap setiap LHP.</li> </ul> <p><b>Juli s.d. Desember 2023</b></p> <p>Melakukan evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 terhadap setiap LHP.</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p><b>Januari s.d. Mei 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan percepatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan melakukan koordinasi ke Pemda untuk melakukan telaahan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga dapat diberikan solusi yang terbaik.</li> </ul>

## Laporan Kinerja Tahun 2023

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL.</li> </ul> <p><b>Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL dengan mengundang seluruh entitas ke kantor BPK Perwakilan.</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL Semester I melalui SIPTL dan secara <i>offline</i>.</li> <li>Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).</li> <li>Evaluasi rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi dan melakukan komunikasi dengan entitas di Tw. III.</li> </ul> <p><b>Juli s.d. November 2023</b></p> <p>Melakukan komunikasi dengan entitas terkait hambatan dalam penyelesaian rekomendasi dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL.</p> <p><b>Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL dengan mengundang seluruh entitas ke kantor BPK Perwakilan.</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL Semester II melalui SIPTL dan secara <i>offline</i>.</li> <li>Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).</li> <li>Evaluasi rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi dan melakukan komunikasi dengan entitas di Tw. I.</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemahaman Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional.</li> <li>Menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's dalam rapat kerja pelaksana/rapat koordinasi teknis.</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <p>Menyiapkan alokasi personil untuk rencana pemeriksaan semester II.</p>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti workshop pemeriksaan yang diadakan oleh Pokja Pemeriksaan Kinerja/PDIT Tematik Nasional</li> <li>Menyiapkan P2, ST dan lainnya yg diperlukan untuk memulai pemeriksaan kinerja/PDIT pendahuluan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan kinerja/PDIT pendahuluan</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti workshop pemeriksaan yang diadakan oleh Pokja Pemeriksaan Kinerja/PDIT Tematik Nasional</li> <li>Menyiapkan P2, ST dan lainnya yg diperlukan untuk memulai pemeriksaan kinerja/PDIT terinci.</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan kinerja/PDIT terinci</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun strategi pengelolaan rencana pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.</li> <li>Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.</li> </ul> <p><b>April s.d. Desember 2023</b></p> <p>Menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.</p>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerjadalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's</li> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal.</li> <li>Menyiapkan alokasi personil untuk rencana pemeriksaan semester II.</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti workshop pemeriksaan yang di adakan oleh Pokja Pemeriksaan Kinerja/PDIT Tematik Lokal.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan P2, ST dan lainnya yg diperlukan untuk memulai pemeriksaan kinerja/PDPT pendahuluan.</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan kinerja/PDPT pendahuluan.</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti workshop pemeriksaan yang di adakan oleh Pokja Pemeriksaan Kinerja/PDPT Tematik Lokal.</li> <li>Menyiapkan P2, ST dan lainnya yg diperlukan untuk memulai pemeriksaan kinerja/PDPT terinci.</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan kinerja/PDPT terinci.</li> </ul> <p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksa pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP.</li> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja.</li> <li>Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD</li> </ul> <p><b>April s.d. Oktober 2023</b></p> <p>Meningkatkan pemahaman dan penerapan pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK pada setiap kesempatan.</p> <p><b>November s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemahaman dan penerapan Pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK pada setiap kesempatan.</li> <li>Mengikuti Survei Pemulaian Implementasi Nilai Dasar BPK</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	Desember	<p><b>Januari s.d. April 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022.</li> <li>Pengelolaan kinerja Triwulan I dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan data dan dokumen dalam rangka evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itama serta menindaklanjuti hasil evaluasi Itama</li> </ul> <p><b>Mei s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja Triwulan II dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku.</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi.</li> <li>Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itama serta menindaklanjuti hasil evaluasi Itama</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja Triwulan III dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi.</li> <li>Menindaklanjuti hasil evaluasi Itama</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja Triwulan IV dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> <li>Menyiapkan laporan kinerja tahunan</li> <li>Menindaklanjuti hasil evaluasi Itama</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	25%	50%	75%	98%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong pelaksanaan mpoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan Aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol SISDM, SMP, SIPTL, dan JASMIN</li> </ul>

## Laporan Kinerja Tahun 2023

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan layanan IK bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan layanan TIK (Aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol SISDM, SMP, SIPTL, dan JASMIN) bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.</li> <li>• Memantau hasil pengukuran pemanfaatan TI Triwulan I dari Biro TI</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan layanan TIK (Aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol SISDM, SMP, SIPTL, dan JASMIN) bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.</li> <li>• Memantau hasil pengukuran pemanfaatan TI Triwulan II dari Biro TI</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan layanan TIK (Aplikasi SIAP LK, SIAP Banparpol SISDM, SMP, SIPTL, dan JASMIN) bagi seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik untuk pemeriksaan maupun non pemeriksaan.</li> <li>• Memantau hasil pengukuran pemanfaatan TI Triwulan III dari Biro TI</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,50%	25%	37,50%	100%	Desember (*minimal 4 aktivitas dalam tahun berjalan)	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2022</li> <li>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>• Menyusun Laporan atas Penerapan <i>Best Practice</i></li> <li>• Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan berupa kegiatan Diklat</li> </ul>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Triwulan I berupa kegiatan Diklat</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>• Menyusun Laporan atas Penerapan <i>Best Practice</i></li> <li>• Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan berupa kegiatan KTF</li> <li>• Menyusun Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Triwulan II berupa kegiatan KTF</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>• Menyusun Laporan atas Penerapan <i>Best Practice</i></li> <li>• Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan berupa kegiatan Mentoring</li> <li>• Menyusun Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Triwulan III berupa kegiatan Mentoring</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>• Menyusun Laporan atas Penerapan <i>Best Practice</i></li> <li>• Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan berupa kegiatan Wawancara Berbasis Pengetahuan</li> <li>• Menyusun Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Triwulan IV berupa kegiatan Wawancara Berbasis Pengetahuan</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <p>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit pada pemeriksaan terinci LKPD.</p> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <p>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit pada pemeriksaan</p>

## Laporan Kinerja Tahun 2023

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																terinci LKPD. <b>Juli s.d. September 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit pada pemeriksaan kinerja</li> <li>Melakukan survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.</li> </ul> <b>Oktober s.d. Desember 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit pada pemeriksaan DTT.</li> <li>Melakukan survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	15 %	20 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	75 %	80 %	85 %	100 %	Desember	<b>Januari 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan diklat Triwulan I dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai</li> <li>Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa</li> </ul> <b>Februari 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>Maret 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir jam diklat pegawai.</li> <li>Usulan diklat Triwulan II untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa</li> </ul> <b>April 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>Mei 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>Juni 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir jam diklat pegawai.</li> <li>Usulan diklat Triwulan III untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa</li> </ul> <b>Juli 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>Agustus 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>September 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir jam diklat pegawai.</li> <li>Usulan diklat Triwulan IV untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa</li> </ul> <b>Oktober 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>November 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa <b>Desember 2023</b> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi Pemeriksa dan Non Pemeriksa

## Laporan Kinerja Tahun 2023

Strategi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	88,50%	88,50%	88,50%	88,50%	Desember	<p><b>Januari s.d. Maret 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2022 dan Kebijakan TA 2022.</li> <li>Menyusun dokumen penganggaran.</li> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan perbaikan Triwulan I</li> </ul> <p><b>April s.d. Juni 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan perbaikan Triwulan II</li> </ul> <p><b>Juli s.d. September 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dan melakukan perbaikan Triwulan III.</li> </ul> <p><b>Oktober s.d. Desember 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun data capaian output.</li> <li>Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.</li> <li>Pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja tahunan</li> </ul>

# Anggaran dan Realisasi Anggaran Perwakilan Tahun 2023

LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT ESELON I : Auditorat Keuangan Negara V

UNIT ESELON II : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

PERIODE PELAPORAN : Desember 2023

KODE RKA K/L	DIPA/PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN/SUBKELUARAN/KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)		
		RENCANA	REALISASI S.D BLN INI (RP)	REALISASI S.D BLN INI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
004.01	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	38.867.619.000	38.674.920.548	99,50%
004.01.CI	PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA	38.867.619.000	38.674.920.548	99,50%
1043	PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA	18.603.894.000	18.426.944.531	99,05%
1043.FAF	LHP BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	16.029.570.000	15.942.621.345	99,46%
	LHP KEUANGAN	7.294.189.000	7.219.669.007	98,98%
1043.FAF.U62	Pemeriksaan Pendahuluan LK Tahun 2022	2.496.862.000	2.496.858.833	100,00%
	Provinsi Sumsel	174.822.000	174.821.800	100,00%
	Kota Palembang	137.657.000	137.656.201	100,00%
	Kota Lubuklinggau	152.726.000	152.726.000	100,00%
	Kabupaten Musi Banyuasin	217.990.000	217.989.290	100,00%
	Kota Pagar Alam	135.265.000	135.265.000	100,00%
	Kabupaten OKU Selatan	138.241.100	138.240.320	100,00%
	Kabupaten Lahat	171.785.500	171.785.500	100,00%
	Kabupaten Empat Lawang	143.018.000	143.017.683	100,00%
	Kabupaten OKU	157.196.400	157.196.380	100,00%
	Kabupaten Musi Rawas	148.860.000	148.860.000	100,00%
	Kabupaten Muara Enim	182.125.000	182.125.000	100,00%
	Kabupaten OKI	92.674.000	92.674.000	100,00%
	Kabupaten Ogan Ilir	115.290.000	115.290.000	100,00%
	Kabupaten OKU Timur	150.030.000	150.030.000	100,00%
	Kabupaten Banyuasin	95.562.000	95.562.000	100,00%
	Kabupaten PALL	134.620.000	134.620.000	100,00%
	Kabupaten Musi Rawas Utara	149.000.000	148.999.659	100,00%
1043.FAF.U62	Pemeriksaan Interim LK Tahun 2023	717.307.000	642.796.000	89,61%
	Kota Palembang	302.285.000	221.595.000	73,31%
	Kota Prabumulih	205.816.000	222.375.000	108,05%
	Kabupaten Musi Rawas Utara	209.206.000	198.826.000	95,04%
1043.FAF.U14	Pemeriksaan Terinci LK Tahun 2022	4.080.020.000	4.080.014.174	100,00%
	Provinsi Sumsel	269.977.000	269.976.856	100,00%
	Kota Palembang	219.629.000	219.628.100	100,00%
	Kota Lubuklinggau	196.490.000	196.489.236	100,00%
	Kota Prabumulih	275.047.000	275.046.550	100,00%
	Kabupaten Musi Banyuasin	366.380.000	366.378.866	100,00%
	Kota Pagar Alam	232.119.000	232.118.808	100,00%
	Kabupaten OKU Selatan	222.722.250	222.722.250	100,00%
	Kabupaten Lahat	208.305.000	208.304.999	100,00%
	Kabupaten Empat Lawang	238.970.750	238.970.500	100,00%
	Kabupaten OKU	234.000.750	234.000.750	100,00%
	Kabupaten Musi Rawas	213.164.250	213.164.250	100,00%
	Kabupaten Muara Enim	214.463.000	214.462.736	100,00%
	Kabupaten OKI	170.512.750	170.512.750	100,00%
	Kabupaten Ogan Ilir	178.427.750	178.427.750	100,00%
	Kabupaten OKU Timur	253.781.750	253.781.750	100,00%
	Kabupaten Banyuasin	160.740.750	160.740.750	100,00%
	Kabupaten PALL	202.118.000	202.117.954	100,00%
	Kabupaten Musi Rawas Utara	223.171.000	223.169.319	100,00%
	LHP KINERJA	2.583.663.000	2.581.761.608	99,93%
1043.FAF.U62	Pemeriksaan Pendahuluan	1.038.357.000	1.038.356.130	100,00%
	Kinerja Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> dan Penerimaan Daerah dalam rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2021 s.d Semester I 2023 pada Kota Prabumulih	157.466.000	157.465.130	100,00%
	Kinerja Pemda dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2021 s.d 2023 (Semester I) pada Kab Musi Rawas Utara	171.509.000	171.509.000	100,00%
	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKU Selatan	162.125.500	162.125.500	100,00%
	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKU	165.751.500	165.751.500	100,00%
	Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Mendukung Program Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d 2023 (Semester I) pada Kota Palembang	72.645.000	72.645.000	100,00%
	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kota Lubuklinggau	163.735.000	163.735.000	100,00%
	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKI	145.125.000	145.125.000	100,00%
1043.FAF.U14	Pemeriksaan Terinci	1.545.306.000	1.543.405.478	99,88%
	Kinerja Terinci Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> dan Penerimaan Daerah dalam rangka Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2021 s.d Semester I 2023 pada Kota Prabumulih	221.375.000	229.418.606	103,63%
	Kinerja Terinci Pemda dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2021 s.d 2023 (Semester I) pada Kab Musi Rawas Utara	327.804.000	322.221.512	98,30%
	Kinerja Terinci atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKU Selatan	199.330.000	196.365.680	98,51%
	Kinerja Terinci atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKU	217.660.000	216.470.890	99,45%
	Kinerja Terinci atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Mendukung Program Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d 2023 (Semester I) pada Kota Palembang	118.750.000	115.786.610	97,50%
	Kinerja Terinci atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kota Lubuklinggau	223.837.000	220.965.300	98,72%
	Kinerja Terinci atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kab OKI	236.550.000	242.176.890	102,38%
	LHP DTT dan Tambahan BA-BUN	6.151.718.000	6.141.190.730	99,83%

Laporan Kinerja Tahun 2023

1043.FAF.051	Pemeriksaan atas LPJ Banparpol Tahun 2022	107.928.000	107.927.900	100,00%
	Parpol Provinsi Sumatera Selatan	6.484.500	6.484.500	100,00%
	Parpol Kota Palembang	6.127.000	6.127.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Banyuasin	4.907.000	4.907.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Empat Lawang	6.166.000	6.166.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Lahat	6.224.000	6.224.000	100,00%
	Parpol Kabupaten OKU Selatan	6.585.000	6.585.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Muara Enim	6.487.500	6.487.500	100,00%
	Parpol Kabupaten Musi Banyuasin	6.138.000	6.138.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Musi Rawas	6.263.500	6.263.500	100,00%
	Parpol Kabupaten Musi Rawas Utara	6.210.000	6.210.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Ogan Ilir	5.666.000	5.666.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Ogan Komering Ilir	6.127.000	6.127.000	100,00%
	Parpol Kabupaten Prabumulih	6.063.500	6.063.400	100,00%
	Parpol Kabupaten Ogan Komering Ulu	5.979.500	5.979.500	100,00%
	Parpol Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	5.985.000	5.985.000	100,00%
	Parpol Kabupaten PALI	5.599.000	5.599.000	100,00%
	Parpol Kota Lubuklinggau	4.544.500	4.544.500	100,00%
	Parpol Kota Pagar Alam	6.385.000	6.385.000	100,00%
1043.FAF.U14	Pemeriksaan Tambahan BA-BUN	6.043.790.000	6.033.262.830	99,83%
	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Kabupaten Banyuasin	319.213.000	311.834.820	97,63%
	Belanja Daerah Kab Muara Enim Tahun 2023	611.249.000	618.614.349	101,20%
	Belanja Daerah Kab Musi Rawas Tahun 2023	608.322.000	627.901.800	103,22%
	Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023	495.075.000	495.429.314	100,07%
	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2021, 2022, dan 2023 (s.d Semester I) di Palembang, Babel, dan Jakarta	341.209.000	326.920.838	95,81%
	Operasional BLUD RS Siti Fatimah Tahun Buku 2021, 2022, dan 2023 (s.d Semester I)	271.185.000	270.745.000	99,84%
	Belanja Daerah Kab Ogan Ilir Tahun 2023	475.165.000	461.471.090	97,12%
	Belanja Daerah Kab OKU Timur Tahun 2023	582.485.000	546.712.640	93,86%
	Belanja Daerah Prov Sumsel Tahun 2023	715.355.000	735.228.469	102,78%
	Belanja Daerah Kab Lahat Tahun 2023	587.115.000	550.610.040	93,78%
	Belanja Daerah Kab PALI Tahun 2023	545.545.000	627.446.870	115,01%
	Belanja Daerah Kab Banyuasin Tahun 2023	491.872.000	460.347.600	93,59%
1043.FAF.083	BAHAN PERUMUSAN PENDAPAT PERWAKILAN	6.138.000	4.978.592	81,11%
	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	6.138.000	4.978.592	81,11%
	Menjusun Bahan Rumusan Pendapat	6.138.000	4.978.592	81,11%
1043.FAF.091	SUMBANGAN IHPS PERWAKILAN	61.368.000	61.272.406	99,84%
	Sumbangan IHPS Perwakilan	61.368.000	61.272.406	99,84%
	Menjusun Sumbangan IHPS	61.368.000	61.272.406	99,84%
1043.FAF.099	LAPORAN PROFIL ENTITAS PERWAKILAN	1.560.000	1.560.000	100,00%
	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1.560.000	1.560.000	100,00%
	Menjusun Laporan Profil Entitas	1.560.000	1.560.000	100,00%
1043.FAF.116	LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA BPK PERWAKILAN	227.555.000	226.475.000	99,53%
	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	227.555.000	226.475.000	99,53%
	Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	227.555.000	226.475.000	99,53%
1043.FAF.124	LAPORAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA ATAU DAERAH PADA BPK PERWAKILAN	275.000.000	271.626.170	98,77%
	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	275.000.000	271.626.170	98,77%
	Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	275.000.000	271.626.170	98,77%
1043.FAF.174	LAYANAN MANAJEMEN PEMERIKSAAN PADA PERWAKILAN	442.100.000	437.401.538	98,94%
	Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan	442.100.000	437.401.538	98,94%
	Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	117.226.000	113.009.660	96,40%
	Melaksanakan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan	297.419.000	297.410.121	100,00%
	Melaksanakan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4.789.000	4.787.807	99,98%
	Melaksanakan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	9.792.000	9.320.600	95,19%
	Melaksanakan Pengelolaan Manajemen SIKAD	12.874.000	12.873.350	99,99%
1043.FAF.175	LAYANAN MANAJEMEN INTERNAL PERWAKILAN	1.560.603.000	1.481.009.480	94,90%
	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.560.603.000	1.481.009.480	94,90%
	Melaksanakan Layanan Tata Usaha	29.196.000	29.086.750	99,63%
	Melaksanakan Layanan Kehumasan	170.855.000	170.539.723	99,93%
	Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	228.028.000	227.826.035	99,91%
	Melaksanakan Layanan Keuangan	243.712.000	243.411.141	99,88%
	Melaksanakan Layanan Umum dan TI	343.071.000	341.048.450	99,41%
	Melaksanakan Layanan Hukum	166.685.000	166.680.047	100,00%
	Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	363.810.000	286.973.612	78,88%
	Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	15.446.000	15.443.722	99,99%



## Laporan Kinerja Tahun 2023

PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023				
UNIT ESELON I : Auditorat Keuangan Negara V		PERIODE PELAPORAN : Desember 2023		
UNIT ESELON II : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan		ANGGARAN (Rp)		
KODE RKA K/L	DIPA/PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN/SUBKELUARAN/KOMPONEN	RENCANA	REALISASI S.D BLN INI	
			(RP)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
004.01	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN			
004.01.CI	PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA			
1043	Pemeriksaan Keuangan negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	20.263.725.000	20.247.976.017	99,92%
1043.CAN	SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	66.374.000	66.333.600	99,94%
1043.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	66.374.000	66.333.600	99,94%
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	66.374.000	66.333.600	99,94%
1043.EBA	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL	19.413.229.000	19.398.203.210	99,92%
1043.EBA.994	LAYANAN PERKANTORAN	19.413.229.000	19.398.203.210	99,92%
<b>1043.EBA.994.001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>13.534.425.000</b>	<b>13.531.753.330</b>	<b>99,98%</b>
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	13.534.425.000	13.531.753.330	99,98%
1043.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.878.804.000	5.866.449.880	99,79%
	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	417.731.000	409.961.657	98,14%
	Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38.400.000	38.400.000	100,00%
	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	294.913.000	293.671.371	99,58%
	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	266.958.000	265.776.000	99,56%
	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	4.348.645.000	4.346.576.432	99,95%
	Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan	512.157.000	512.064.420	99,98%
1043.EBB	LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL	784.122.000	783.439.207	99,91%
1043.EBB.951	Layanan Sarana Internal	304.138.000	303.578.200	99,82%
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	304.138.000	303.578.200	99,82%
1043.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	479.984.000	479.861.007	99,97%
	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	479.984.000	479.861.007	99,97%

## Skor Capaian Kinerja Tahun 2023

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
<b>SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>					<b>99,89</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>					<b>99,89</b>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	88,67%	88,67	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,34%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,74%	100,74	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,94%	100,94	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,74	94,80	
8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	88,90	99,89	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	96,28%	98,25	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,75	98,68	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	91,19%	103,04	

## Berita Acara Validasi Kinerja Tahun 2023

+ BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Scorecard	Triwulan...					99,89	●
+ Sasaran Kegiatan, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...					99,89	●
+ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	88,66%	88,66	●	
+ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00%	100	●	
+ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	86,34%	105	●	
+ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,74%	100,74	●	
+ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00%	100	●	
+ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,94%	100,94	●	
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5,00	5,00	4,74	94,8	●	
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	89,00	89,00	88,90	99,89	●	
+ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	98,00%	98,00%	96,28%	98,25	●	
+ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00%	100	●	
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3,75	98,68	●	
+ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00%	100	●	
+ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	88,50%	88,50%	91,19%	103,04	●	



BERITA ACARA VALIDASI  
VALIDASI DATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

SATKER: BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

NAMA IKU	SEBELUM VALIDASI (Data pada periode penginputan s.d tgl 15 Januari 2024)		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)		CATATAN	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	94,49%	100,00%	88,67%	sesuai perhitungan nilai gradasi dari EPP
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengusan	100,00%	100,00%	100,00%	100%	sesuai
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	86,56%	75,00%	86,34%	Sesuai dengan data update TLRHP sesuai IHPS TA 2023 smtr 1
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,00%	100,00%	100,74%	sesuai
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%	100%	sesuai
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00%	100,94%	sesuai
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	0,00	5	4,74	Sesuai dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Pengukuran PT WDU
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	89,00	88,90	89,00	88,90	sesuai ND Itama
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	84,27%	98,00%	96,28%	Sesuai data Bidics TW 4
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	sesuai
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	0,00	3	3,75	Sesuai dokumen pendukung berupa Laporan Hasil Pengukuran PT WDU
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	sesuai
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	89,84%	88,50%	91,19%	sesuai data ND EKA dan EPA

Jakarta, Januari 2024

Kepala Seksi MAKIN I,  
  
Sonia Mocharjono Puteri  
NIP 198005252007082001

LO PSMK,  
  
Prasetyo Adi Nugroho  
NIP 198402072008081001

Manajer IKU,  
  
Rita Diana  
NIP 197208061997032001

Inputer IKU,  
  
Anita Frihani  
NIP 1973021711998032005

